



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA TIGA BELAS PEMERINTAH DAERAH

Pontianak, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) pada hari ini, Selasa 28 Mei 2019, telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018, kepada tiga belas entitas pemeriksaan pada wilayah Kalimantan Barat di Ruang Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, **Joko Agus Setyono**, bertempat di Ruang Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

LKPD merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memberikan keyakinan apakah LKPD telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya

Sebagai hasil pelaksanaan pemeriksaan keuangan tersebut, BPK menyampaikan 3 (tiga) buah buku laporan hasil pemeriksaan yang memuat: 1) opini atas kewajaran laporan keuangan; 2) pengendalian internal; dan 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketiga-tiganya perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD, sebagai upaya penyempurnaan Laporan Keuangan, yang merupakan perwujudan akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kabupaten Sambas kini WTP

Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap tiga belas entitas, sebanyak dua entitas masih berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Bengkayang dan Kayong Utara. Kabupaten Sambas, kini menyusul sepuluh entitas lainnya yang telah lebih dulu dan masih memperoleh opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP), yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Mempawah.

Permasalahan

Pemberian opini WDP dan WTP tidak serta merta tanpa permasalahan pengelolaan laporan keuangan. Permasalahan aset masih ditemukan pada minimal dua belas pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Masih terdapat pemda yang mencatat aset secara gabungan, kapitalisasi aset yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, bukti kepemilikan dan belum seluruh aset dilakukan pencatatan. Dalam hal penganggaran, sebanyak sepuluh entitas masih melakukan kesalahan dalam menganggarkan belanja modal dan belanja barang. Pemerintah daerah juga perlu untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan, antara lain kepastian pengaturan dalam perda, pembenahan pemungutan retribusi, penetapan sebagai sumber PAD, dan penggiatan penagihan piutang pendapatan. Dalam hal pembayaran, juga terjadi kelebihan bayar, baik atas belanja pegawai, barang, dan modal.